

TESIS

**KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PERKARA FIKTIF POSITIF PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)*

Dosen Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri.,S.H.,M.Kn

Dr. Hengki Andora.,S.H., L.L.M



Disusun Oleh :

HAFIZ NARAZAKY ZARFI.,S.H

1920112011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Fiktif
Positif Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja**

(Bimbingan : Dr. Azmi Fendri.,S.H.,M.Kn dan Dr. Hengki Andora.,S.H.,L.LM)

ABSTRAK

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memuat konsep fiktif positif yang ditimbulkan karena sikap diamnya pemerintah dianggap telah mengeluarkan keputusan penerimaan atas permohonan. Atas dikeluarkannya keputusan fiktif positif pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan guna mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan. Tahun 2020 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dalam pasal 175 adanya perubahan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang menghilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima permohonan fiktif positif menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan Jenis penelitian *Yuridis Normatif*, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, konseptual, sejarah dan pendekatan kasus. Penulis menyimpulkan bahwa, *Pertama* Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif sebelum berlakunya undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yakni diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagai hukum materil, sedangkan sebagai hukum formil Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan, akan tetapi faktanya ada perbedaan maksud dari permohonan yang dinormakan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. *kedua* Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dihilangkan oleh pembuat Undang-Undang dengan telah merevisi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan cara tidak adanya frasa pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara *Ketiga* Eksistensi keputusan Fiktif Positif pasca berlakunya UU Cipta Kerja menjadi hal yang ditunggu warga karena, pemohon langsung akan mendapat bukti dari permohonan yang dianggap dikabulkan melalui sistem elektronik yang menjadi pembaharuan sistem dalam dunia pelayanan publik.

Kata Kunci : Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Fiktif Positif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

**Absolute Competence of the State Administrative Court in Positive
Fictitious Cases after the enactment of Law Number 11 of 2020
Concerning Job Creation**

(Guidance: Dr. Azmi Fendri.,S.H.,M.Kn and Dr. Hengki Andora.,S.H.,L.LM)

ABSTRACT

The State Administrative Court has the duty and authority to examine, decide, and resolve State Administrative disputes. Article 53 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which contains a positive fictitious concept caused by the government's silence is considered to have issued a decision to accept the application. Upon the issuance of a positive fictitious decision, the applicant may submit an application to the Court to obtain a decision on the acceptance of the application. In 2020, with the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning job creation in article 175, there was an amendment to Article 53 of Law Number 30 of 2014 which eliminated the authority of the State Administrative Court in accepting positive fictitious applications, resulting in the absence of legal certainty for the community. This research is a type of normative juridical research, using a legal, conceptual, historical and case approach. The author concludes that, First, the Absolute Competence of the State Administrative Court in positive fictitious cases prior to the enactment of Law 11 of 2020 concerning job creation, which is regulated in Article 53 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration as a material law, while as a formal law the Court The Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 8 of 2017 concerning Procedural Guidelines to obtain a decision on receiving an application in order to obtain a decision, but in fact there are differences in the intent of the application which is normalized in Article 53 of Law Number 30 of 2014 with the Supreme Court Regulation. Second, the Absolute Competence of the State Administrative Court in positive fictitious cases after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has been removed by the legislators by having revised Article 53 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration by means of the absence of the phrase the applicant can submit an application to the Third State Administrative Court. The existence of a positive fictitious decision after the enactment of the Job Creation Law is something that citizens are waiting for because, the applicant will immediately receive evidence of the application that is considered granted through an electronic system which is a system renewal in the world of public services.

Keywords: Absolute Competence of the State Administrative Court, Positive Fictitious, Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation.